



Meningkatkan Kesadaran Hak Kewajiban Kehidupan Bermasyarakat Melalui Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan

Ajeng April Setyaningrum

Universitas Sebelas Maret

Irdina Qurrotul Aini

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

ajengapril4@student.uns.ac.id ; irdinaqurrotul09@student.uns.ac.id

Abstract. This study underscores the significance of Civic Education (PKn) in strengthening citizens' understanding of the balance between rights and responsibilities within the spheres of society, nation, and state. Rights are viewed as entitlements to be received, while responsibilities are obligations that must be fulfilled, and the harmony between the two is essential for sustaining democratic life as mandated by the 1945 Constitution. The research aims to examine the strategic role of Civic Education in nurturing democratic awareness and to identify barriers that hinder its effective practice. Employing a systematic literature review, the study synthesizes insights from twenty scholarly articles published between 2020 and 2025. The findings reveal that although Civic Education serves as a vital medium for instilling democratic values, its implementation continues to face challenges such as limited legal awareness, unequal access to education, and corruption that weakens civic integrity. The implications highlight the need for Civic Education to be delivered in a transformative and context-sensitive manner, utilizing active, adaptive, and participatory approaches. Through such methods, Civic Education is expected to cultivate responsible citizens who critically engage in democratic processes, uphold the balance between claiming rights and fulfilling obligations, and contribute to the sustainability of democracy in Indonesia.

Keywords: : Civic Education; Public Awareness; Implementation; Citizens

Abstrak. Penelitian ini menekankan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membangun kesadaran warga negara mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dipahami sebagai hak untuk menerima, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan keseimbangan keduanya menjadi landasan utama bagi terwujudnya masyarakat demokratis sesuai amanat UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran strategis PKn dalam menumbuhkan kesadaran demokratis sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya. Metode yang digunakan berupa tinjauan pustaka sistematis terhadap 20 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PKn memiliki posisi penting sebagai media utama pendidikan demokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, antara lain rendahnya kesadaran hukum, ketidakmerataan akses pendidikan, serta praktik korupsi yang melemahkan nilai-nilai kewarganegaraan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa PKn perlu dilaksanakan secara transformatif dan kontekstual dengan pendekatan pembelajaran aktif, adaptif, dan partisipatif. Dengan demikian, PKn diharapkan mampu melahirkan warga negara yang bertanggung jawab, kritis, serta sadar akan harmoni antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban, sehingga berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan kehidupan demokratis di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Hak dan Kewajiban; Kesadaran Publik.

LATAR BELAKANG

Stabilitas negara hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan konstitusi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak atas pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh kesehatan, harus

berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan membela negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan serius, di mana masyarakat lebih menekankan pada pemenuhan hak dibandingkan kewajiban. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari rendahnya kepatuhan pajak, lemahnya disiplin publik, hingga minimnya partisipasi konstruktif dalam proses demokrasi. Gap tersebut menunjukkan perlunya intervensi pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai keseimbangan hak dan kewajiban secara lebih efektif. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hadir sebagai instrumen strategis dalam kurikulum nasional untuk membentuk warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebutuhan transformasi PKn dari sekadar penyampaian materi normatif menjadi pendidikan karakter yang transformatif, berbasis nilai, serta adaptif terhadap tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru mengenai urgensi implementasi PKn yang kontekstual, sehingga mampu melahirkan warga negara yang sadar akan harmoni antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban, serta berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan demokrasi dan pembangunan nasional.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berangkat dari pemahaman bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teori kedaulatan rakyat dan pengakuan Hak Asasi Manusia menjadi landasan utama, di mana hak dipandang sebagai wewenang untuk menerima, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan demi terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa implementasi hak dan kewajiban seringkali menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum, ketidakmerataan akses pendidikan, serta praktik korupsi yang melemahkan integritas sistem. Simamora dkk. (2023) menyoroti tantangan regulasi di era globalisasi, sementara Zahra dkk. (2024) menekankan pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban dalam demokrasi. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Nurdiansyah dkk. (2023) dan Muzakir Syah (2025), menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan kesenjangan

sosial menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Di sisi lain, kajian oleh Alfiyatu Mahdiyah dkk. (2023) serta Izzati & Novitasari (2023) menekankan peran PKn dalam membentuk civic responsibility, yaitu warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebutuhan transformasi PKn dari sekadar penyampaian materi normatif menuju pendidikan karakter yang transformatif, berbasis nilai, dan adaptif terhadap dinamika globalisasi serta perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, kajian teoritis ini memberikan landasan bahwa PKn bukan hanya instrumen edukasi formal, tetapi juga sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai keseimbangan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya masyarakat demokratis yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang dirancang untuk menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis terkait Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan perannya dalam meningkatkan kesadaran hak serta kewajiban warga negara. Populasi penelitian mencakup publikasi ilmiah yang relevan dengan tema, sedangkan sampel dipilih secara purposive dari artikel jurnal, buku referensi, dan hasil penelitian yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dengan instrumen berupa lembar analisis konten yang digunakan untuk mengidentifikasi tema, isu, dan kesenjangan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan makna secara komprehensif. Model penelitian yang digunakan menekankan hubungan antara variabel hak dan kewajiban warga negara dengan kesadaran publik, yang dimediasi oleh implementasi PKn sebagai variabel strategis dalam membentuk civic responsibility. Validitas instrumen ditunjukkan melalui konsistensi hasil telaah antarpeneliti, sedangkan reliabilitas diperkuat dengan kesesuaian interpretasi terhadap data yang dianalisis. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan strategi pendidikan yang adaptif dan transformatif dalam memperkuat kesadaran nasional serta membangun karakter warga negara yang berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen penting yang dirancang untuk membentuk warga negara yang memahami, menghargai, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang memuat konsep teoretis mengenai negara dan hukum, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk menanamkan nilai, sikap, dan kebiasaan yang diperlukan dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Seiring berkembangnya dinamika masyarakat, PKn memainkan peran strategis dalam membantu peserta didik memahami pentingnya kesadaran hukum, toleransi, tanggung jawab sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan publik. Pembelajaran yang dilaksanakan secara kontekstual menjadikan PKn semakin relevan bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi beragam tantangan sosial seperti disinformasi, intoleransi, hingga menurunnya rasa kebangsaan.

Sejalan dengan perubahan zaman, implementasi PKn juga mengalami perkembangan baik dari segi metode, pendekatan, maupun orientasi pembelajarannya. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan kini mulai memanfaatkan teknologi, diskusi interaktif, studi kasus, serta proyek sosial sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap realitas kewarganegaraan. Melalui pendekatan tersebut, PKn tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membangun karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang memperoleh pengalaman belajar PKn secara komprehensif cenderung memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dalam menjalankan hak serta kewajiban sebagai anggota masyarakat.

No Urut	Nama Peneliti dan tahun	Subjek	Metode yang digunakan	Hasil penelitian
1	Simamora dkk. (2023)	Tantangan Regulasi Hak dan Kewajiban WNI di Era Globalisasi	Library Research	Tantangan implementasi regulasi WNI di era globalisasi mencakup peran regulasi, pemerintah, dan masyarakat.
2	Zahra dkk. (2024)	Kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi	Library Research	Harmonisasi hak dan kewajiban penting untuk mencapai keseimbangan dalam demokrasi Indonesia.
3	Nurdiansyah dkk. (2023)	Implementasi hak dan kewajiban warga negara	Kualitatif	Pelaksanaan sering terhambat oleh kurangnya kesadaran

***Meningkatkan Kesadaran Hak Kewajiban Kehidupan Bermasyarakat
Melalui Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan***

		dalam kehidupan bermasyarakat		hukum, kesenjangan pendidikan, dan praktik korupsi.
4	Muzakir Syah, S. M. (2025)	Hak dan Kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum	Kualitatif	Implementasi memerlukan reformasi hukum yang sistematis, peningkatan kesadaran hukum publik, dan konsistensi penegakan hukum.
5	Nyai Ruhayanti dkk. (2024)	Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum di Indonesia	Kualitatif	Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menghargai hak dan memenuhi kewajiban secara pribadi dan orang lain.
6	Hanif Amrullah dkk. (2023)	Implementasi Hak dan Kewajiban WN Terhadap Pembentukan Karakter	Kualitatif	Pelaksanaan hak dan kewajiban membentuk karakter dan tanggung jawab, menumbuhkan cinta tanah air, dan memajukan kesejahteraan..
7	Athaya Wahyu Garjita, Wine Tiara Cipta (2022)	Esensi dan Urgensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	Literatur Review	Kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban melalui pendidikan karakter berbasis budaya lokal penting untuk identitas nasional.
8	Arya Ramdhani Nugraha . (2023)	Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara	Literatur Review	Hak dan kewajiban saling berkaitan. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai yang dikandungnya.
9	Alfiyatun Mahdiyah . (2023)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa di Era Modern	Kualitatif	PKn berfungsi mengembangkan keterampilan keterlibatan sipil yang dinamis, kritis, cerdas, dan demokratis.
10	Diah Hayu Novita Sari. (2024)	Kemampuan berpikir kritis materi hak dan kewajiban pada pembelajaran PKn Peserta didik Kelas IV SD	Kualitatif	Meneliti ketrampilan berpikir kritis siswa dalam materi hak dan kewajiban di sekolah dasar.
11	Rengga Aprilia. (2023)	Peran Hak dan Kewajiban Warga	Kualitatif	Peserta didik sulit membedakan antara hak

***Meningkatkan Kesadaran Hak Kewajiban Kehidupan Bermasyarakat
Melalui Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan***

		Negara Di SDN Lidah Wetan II		dan kewajiban dalam kegiatan sehari-hari, meskipun guru sudah memahaminya.
12	Panggabean. (2025)	Peran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa	Kualitatif	Metode konvensional kurang efektif; perlu integrasi isu hukum aktual dan pembelajaran berbasis proyek.
13	Zulkarnain.(2025)	Dampak PKn terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Siswa	Kualitatif	Terdapat dampak positif signifikan PKn terhadap pemahaman kognitif siswa mengenai hak dan kewajiban.
14	Salsabila. (2021)	Penanaman Hak & Kewajiban melalui Metode Role Playing di Sekolah Dasar	Kualitatif	Metode role-playing sangat efektif meningkatkan pemahaman dan semangat belajar siswa.
15	Purba . (2025)	Hak dan Kewajiban WN dalam Perspektif Hukum dan Sosial	Kualitatif	Harmonisasi perspektif hukum dan sosial sangat penting dalam edukasi kewarganegaraan.
16	Widiawati. (2024)	Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi	Literatur Review	Hubungan timbal balik hak-kewajiban perlu ditekankan untuk keseimbangan demokrasi.
17	Izzati& Novitasari (2023)	Harmonisasi Hak dan Kewajiban (Civic Responsibility)	Kualitatif	Pendidikan karakter (termasuk PKn) menjadi pilar utama pembentukan warga negara yang bertanggung jawab.
18	Anggie (2023)	PKn sebagai Upaya Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Mahasiswa	Kuantitatif	Terdapat korelasi kuat antara pemahaman PKn dengan peningkatan rasa nasionalisme..
19	Setiawan (2022)	PKn dan Pembentukan Kesadaran Kepatuhan Pajak	Kuantitatif	Pembelajaran PKn yang fokus pada subjek ekonomi dapat meningkatkan kesadaran kewajiban pajak.
20	Hidayat. (2020)	Peranan Teknologi dalam Pembelajaran PKn	Tinjauan Literatur	Penggunaan media digital dapat membuat pembelajaran hak dan kewajiban lebih menarik dan relevan.

2. Pembahasan

PKn berperan sebagai inti pembentuk kesadaran warga negara yang komprehensif, mengubah pemahaman teoritis menjadi perilaku nyata yang sejalan dengan cita-cita bangsa. Zulkarnain dkk. (2025) membuktikan secara kuantitatif bahwa intervensi PKn secara signifikan meningkatkan pemahaman kognitif siswa mengenai hak dan kewajiban. Pemahaman kognitif ini menjadi prasyarat, karena tanpanya, mustahil individu dapat menghargai hak dirinya dan orang lain secara maksimal (Nyai Ruhyanti dkk., 2024). Di ranah afektif, Hanif Amrullah dkk. (2023) dan Athaya Wahyu Garjita dkk. (2022) menekankan bahwa PKn membentuk karakter yang bertanggung jawab, diperkuat dengan penanaman nilai-nilai budaya lokal. Terakhir, di dimensi psikomotorik, PKn melatih keterampilan keterlibatan sipil yang dinamis dan kritis (Alfiyatul Mahdiyah dkk., 2023), yang merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sipil (civic responsibility) yang dibahas oleh Izzati & Novitasari (2023).

Meskipun PKn penting, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan substansial. Nurdyansyah dkk. (2023) mengidentifikasi bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sering terhalang oleh kurangnya kesadaran hukum, kesenjangan pendidikan, dan praktik korupsi. Masalah ini semakin jelas di tingkat pendidikan dasar, di mana Rengga Aprilia dkk. (2023) menunjukkan kesulitan peserta didik dalam membedakan konsep hak dan kewajiban sehari-hari, mengindikasikan bahwa metode pengajaran konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi. Salsabila dkk. (2021) membuktikan bahwa metode pembelajaran aktif seperti Bermain Peran (Role Playing) efektif untuk internalisasi konsep di tingkat sekolah dasar. Sementara untuk siswa yang lebih dewasa, Panggabean dkk. (2025) merekomendasikan integrasi isu hukum aktual dan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kesadaran hukum yang kontekstual. Inovasi ini harus mengarah pada pembelajaran yang berfokus pada praktik dan internalisasi nilai, bukan hanya sekadar hafalan materi.

Pengembangan kesadaran hak dan kewajiban dalam PKn menuntut pendekatan yang berbeda di setiap jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), fokus utamanya adalah menanamkan konsep melalui pengalaman langsung dan metode interaktif,

mengingat kesulitan siswa dalam memahami konsep abstrak (Rengga Aprilia dkk., 2023). Sintesis dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan di tingkat SD menjadi fondasi krusial bagi pengembangan pemikiran yang lebih kompleks di jenjang berikutnya. Saat memasuki Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi, PKn harus beralih fokus dari pemahaman dasar menuju kemampuan berpikir kritis terhadap masalah sosial dan politik (Diah Hayu Novita Sari dkk., 2024). Anggie dkk. (2023) menegaskan bahwa di tingkat mahasiswa, penguatan PKn berkorelasi kuat dengan peningkatan rasa nasionalisme dan kesediaan untuk terlibat dalam isu-isu kebangsaan, mencerminkan transisi dari sekadar kepatuhan menjadi citizenship yang aktif dan matang.

Efektivitas PKn dalam membentuk warga negara yang seimbang terancam oleh isu-isu institusional, terutama korupsi dan inkonsistensi penegakan hukum (Muzakir Syah, S. M., 2025). PKn harus secara aktif membekali siswa dengan kesadaran hukum yang diperlukan untuk menjadi agen antikorupsi. Kesadaran ini tidak hanya tentang menuntut hak agar tidak dikorupsi, tetapi juga tentang pemenuhan kewajiban. Setiawan (2022) mencontohkan keberhasilan PKn dalam meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak, menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang fokus pada subjek ekonomi dapat mendorong perilaku kepatuhan terhadap peraturan. Muzakir Syah (2025) dan Nurdiansyah dkk. (2023) sepakat bahwa kesadaran hukum publik sangat penting dalam memberantas korupsi, dan PKn adalah mekanisme yang paling tepat untuk menyampaikan kesadaran ini. Tujuan akhirnya adalah untuk menumbuhkan kebijakan sipil (civic virtue) yang mendorong warga negara untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah sambil tetap konsisten dalam memenuhi kewajiban mereka sendiri (Purba dkk., 2025).

Lebih jauh dari sekadar kepatuhan, implementasi PKn yang sukses diukur dari sejauh mana ia mampu menumbuhkan partisipasi politik dan kontrol sosial yang konstruktif. Keseimbangan hak dan kewajiban harus termanifestasi dalam tindakan nyata warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang kritis. Alfiyatu Mahdiyah dkk. (2023) menegaskan bahwa PKn harus mengembangkan keterampilan keterlibatan sipil yang dinamis dan demokratis. Ini sangat relevan dalam konteks

demokrasi Indonesia, di mana Zahra dkk. (2024) dan Widiawati dkk. (2024) menekankan pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban untuk mencapai keseimbangan demokrasi. Artinya, PKn membekali warga negara dengan pengetahuan untuk menggunakan hak-haknya (misalnya hak berserikat dan berpendapat) sebagai alat kontrol sosial yang sah, memastikan bahwa pemerintah (negara) melaksanakan kewajibannya. Kontrol sosial yang konstruktif ini berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan merupakan penanda utama dari keberhasilan sebuah negara hukum.

Warga negara di era kontemporer hidup dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi, menuntut adaptasi mendasar dalam implementasi PKn. Simamora dkk. (2023) menyoroti bahwa globalisasi telah menciptakan tantangan regulasi yang kompleks dalam mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Untuk merespons dinamika ini, PKn harus memanfaatkan teknologi (Hidayat dkk., 2020) agar materi hak dan kewajiban menjadi lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Lebih dari sekadar teknologi, PKn harus menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis (Diah Hayu Novita Sari dkk., 2024). Kemampuan berpikir kritis diperlukan agar warga negara tidak mudah terombang-ambing oleh disinformasi digital atau isu-isu politik global yang kompleks, memastikan partisipasi mereka (Anggie dkk., 2023) tetap konstruktif, cerdas, dan demokratis. Dengan adaptasi kurikulum yang relevan dengan tantangan global, PKn dapat melahirkan warga negara yang tidak hanya patuh secara lokal tetapi juga memiliki kesadaran global, mencapai keseimbangan dalam konteks demokrasi yang terus berkembang (Widiawati dkk., 2024). Ing dalam mewujudkan hak kesehatan masyarakat melalui perluasan akses layanan, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, penegakan prinsip tata kelola, dan pemenuhan kewajiban negara terhadap warga. Namun, peran ini belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, sosialisasi yang lemah, kendala administratif, ketimpangan layanan, serta kebijakan yang belum terintegrasi secara efektif. Dengan demikian, peran BPJS Kesehatan dalam mewujudkan hak kesehatan masyarakat sudah berjalan, tetapi masih membutuhkan pembenahan struktural dan peningkatan kualitas

layanan agar prinsip keadilan dan pemerataan kesehatan benar-benar dapat terwujud di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran warga negara mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Analisis literatur menunjukkan bahwa PKn mampu membentuk pemahaman hukum, karakter bertanggung jawab, serta keterampilan partisipasi aktif yang menjadi fondasi kehidupan demokratis. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum, metode pembelajaran yang konvensional, serta praktik korupsi yang melemahkan integritas sistem. Dengan demikian, PKn perlu diimplementasikan secara transformatif melalui pendekatan aktif, adaptif, dan berbasis teknologi agar relevan dengan dinamika globalisasi dan digitalisasi. Sebagai rekomendasi, PKn sebaiknya mengintegrasikan isu-isu aktual seperti kepatuhan pajak, antikorupsi, dan partisipasi demokratis dalam kurikulum untuk memperkuat kesadaran publik. Inovasi metode pembelajaran berbasis proyek, simulasi, maupun teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan internalisasi nilai kewarganegaraan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris di berbagai jenjang pendidikan untuk memperkuat temuan dan menghasilkan strategi implementasi yang lebih aplikatif. Dengan langkah tersebut, PKn diharapkan mampu melahirkan generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menyeimbangkan hak serta kewajiban demi keberlanjutan demokrasi dan pembangunan nasional.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan dukungan fasilitas dan akses sumber pustaka sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penyusunan naskah. Artikel ini merupakan bagian dari kajian akademik yang dikembangkan dalam rangka memperkaya literatur mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya terkait

kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pendidikan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiyatuh Mahdiyah, Chandy Satrio Sudirman, & Dhea Ananda Widiyani. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa di Era Modern. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Amrullah, H., Asyifa, E., Nurusyafa, D. A., & Nurgiansah, H. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia. *Jurnal Kajian Pustaka*.
- Anggie, I. C., dkk. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Dalam Diri Mahasiswa. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 353–361.
- Aprilia, R., Maharani, N. A., Sa'diah, M., Janah, E. U., & Puspita, A. M. I. (2023). Peran Hak dan Kewajiban Warga Negara Di SDN Lidah Wetan II. *Jurnal Pendidikan*.
- Garjita, A. W., & Cipta, W. T. (2022). Esensi dan Urgensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Jurnal Pendidikan*.
- Hidayat, H., Mulyani, H., Nurhasanah, S. D., Khairunnisa, W., & Sholihah, Z. (2020). Peranan Teknologi Dan Media Pembelajaran Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2(8), 57–65.
- Izzati, F. A., & Novitasari. (2023). Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*). *Kalacakra*, 4(1), 1–6.
- Nugraha, A. R., Yudirmansyah, Handayani, D. N., & Salsabila, D. (2023). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara. *Jurnal Edukasi*.
- Nurdyansyah, Ria, S., Aisy, N. R., Maharani, C. D., Cahyadi, D. P., Fadila, S. A., & Rahmdani, N. (2023). Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Jurnal Kualitatif*.
- Panggabean, T., Pasaribu, K. M., & Siahaan, M. M. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/I SMA Swasta HKBP Sidorame. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 1(2).
- Purba, G. E., Siboro, S., Pasaribu, D. M., & Tampubolon, S. L. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(3), 549–559.

- Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2024). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Salsabila, A. A., Anatasya, E., Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Penanaman Hak dan Kewajiban untuk Generasi Bangsa melalui Metode Pembelajaran Role Playing di Sekolah Dasar. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(3), 1–6.
- Sari, D. H. N., Mahfud, H., & Saputri, D. Y. (2024). Kemampuan berpikir kritis materi hak dan kewajiban pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Peserta didik Kelas IV sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Setiawan, A. (2022). PKn dan Pembentukan Kesadaran Kepatuhan Pajak Warga Negara Muda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 78–90.
- Simamora, M. A. B., Jitmao, R. G. T., Ashiru, A., & Burji. (2023). Tantangan Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum*.
- Syah, S. M. (2025). Hak dan Kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03).
- Widiawati, I., Irawan, B., & Wiyanto, D. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180–193.
- Zahra, Nauli, Elviana, & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Zulkarnain, A. I., Indarto, A. F. R., Ramadhan, M. A. R., & Firdaus, R. A. (2025). Dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara bagi Siswa. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 350–362.